

**KRONOLOGI DAN PENYELESAIAN KONFLIK TATA KELOLA
BANTUAN SOSIAL PROVINSI DI KELURAHAN KOPO KECAMATAN
BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG**

(Skripsi)

Oleh

ZULFA FAUZIA

NPM 1716011070



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KRONOLOGI DAN PENYELESAIAN KONFLIK TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL PROVINSI DI KELURAHAN KOPO KECAMATAN BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG

Oleh

ZULFA FAUZIA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk mengatasi kebutuhan pangan yang meningkat dengan memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak. Namun, bantuan tersebut tidak terlepas dari adanya konflik di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kronologi dan penyelesaian konflik bantuan sosial di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik meningkat sesuai dengan tahapannya. Pertama tahap potensi konflik, yaitu tidak ada informasi dan data akurat yang dapat dipercaya. Kedua tahap konfrontasi, yaitu informasi sudah ada tetapi masih simpang siur terkait tata kelola penyaluran bantuan sosial. Ketiga tahap krisis, yaitu terdapat ketegangan, penolakan, dan protes pada pemerintah. Keempat, setelah penolakan menjadi viral menyebabkan kegaduhan di Kelurahan Kopo dan sekitarnya yang mengetahui kejadian penolakan tersebut. Konflik bantuan sosial tersebut dapat diselesaikan melalui negosiasi dengan pendekatan persuasif.

Kata Kunci : Konflik, Bantuan Sosial, Tata kelola, Penyelesaian Konflik, Covid-19

ABSTRACT

CRONOLOGY AND CONFLICT SETTLEMENT OF GOVERNANCE PROVINCIAL SOCIAL ASSISTANCE IN KOPO VILLAGE BOJONGLOA KALER DISTRICT BANDUNG CITY

By

ZULFA FAUZIA

The Covid-19 pandemic, which had an influence on people's food security, prompted this study. The West Java Provincial Government is attempting to alleviate the rising food demands of the afflicted populations by offering social support. However, this support is inextricably linked to the community's dispute. The chronology and resolution of social assistance conflicts in Kopo Village, Bojongloa Kaler District, Bandung City are explained in this paper. This research takes a qualitative method, relying on in-depth interviews and documentation to acquire data. According to the study's findings, conflict arose as the stages progressed. The first is the pre-conflict stage when no reliable information or precise data is available. Stage two is confrontation, namely, information already exists but there is still confusion about the governance of social aid distribution. Tension, rejection, and revolt against the administration are the three stages of the crisis. Fourth, after the refusal went viral, it sparked a flurry of activity in Kopo Village and its environs among those who were aware of the refusal. Negotiation using a compelling approach helps address the social assistance problem.

Keywords : Conflict, Social Assistance, Governance, Conflict settlement, Covid-19

**KRONOLOGI DAN PENYELESAIAN KONFLIK TATA KELOLA
BANTUAN SOSIAL PROVINSI DI KELURAHAN KOPO KECAMATAN
BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG**

Oleh

ZULFA FAUZIA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi

: **KRONOLOGI DAN PENYELESAIAN
KONFLIK TATA KELOLA BANTUAN
SOSIAL PROVINSI DI KELURAHAN KOPO
KECAMATAN BOJONGLOA KALER KOTA
BANDUNG**

Nama Mahasiswa

: **Zulfa Fauzia**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1716011070**

Program Studi

: **Sosiologi**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Hartoyo, M.Si
NIP. 19601208 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Bartoven Vivit Nurdin, is written over the text '2. Ketua Jurusan Sosiologi'.

Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 19770401 200501 2 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.



Penguji
Bukan Pembimbing : Drs. Ikram, M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 1960807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Mei 2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Zulfa Fauzia

NPM. 1716011070

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zulfa Fauzia, dilahirkan di Bandung pada tanggal 14 November 1998. Penulis merupakan anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Yoga M Supriatman dan Ibu Yanti Sugiarti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam.

Pendidikan formal yang telah ditempuh yaitu:

1. TK Miftahul Khair, pada tahun 2004-2006
2. SDN Margaluyu, pada tahun 2006-2011
3. SMP YAPI Al-Husaeni, pada tahun 2011-2014
4. MAN 1 Bandung, pada tahun 2014-2017

Pada Bulan tahun 2017 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selanjutnya pada tahun 2020 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Tri Mukti Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Kemudian di tahun yang sama penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung selama 40 hari.

MOTTO

"Life is the art of drawing without an eraser"

John W Garden

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua Tercinta

Yoga M Supriatman

dan

Yanti Sugiarti

Orang tua yang telah membesarkan dan merawat hingga tumbuh dewasa seperti saat ini, ikhlas dalam mendidik, memberikan ilmu agama dan dunia, memberi dukungan dalam segala situasi, moril dan material selama menempuh pendidikan hingga sekarang. Terimakasih atas semua doa dan harapan yang besar, akan aku lakukan semua hal yang dapat membanggakan dan membahagiakan kalian berdua serta terimakasih telah menjadi pembimbing hidup yang paling setia sampai saat ini.

Saudara Sekandung

Fitri Rabbani

Nayla Agnia Revanti

Saudara kandung yang selalu menjadi pendukung dan teman penghibur di saat suka maupun duka, mampu menjadikan diri ini sebagai pribadi yang kuat dan tangguh

Serta Almamater tercinta yang sangat aku banggakan

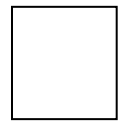
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kronologi dan Penyelesaian Konflik Tata Kelola Bantuan Sosial Provinsi di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung”** yang merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dari baik materi pembahasan maupun tata bahasanya, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran yang membangun dari pihak pembaca yang baik guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan karya tulis ini diantaranya :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmu-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses pendidikan dan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu, tentu saja dengan seizin Allah SWT.
2. Rektor, Wakil Rektor, segenap pimpinan dan tenaga kerja Universitas Lampung.
3. Ibu Drs. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.



5. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Bapak Dr. Robi Ahyadi K, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Universitas Lampung.
8. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan mengajari penulis sampai skripsi penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih karena sudah banyak mengajarkan penulis untuk menjadi orang yang lebih bertanggung jawab terhadap kewajiban. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan segala kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
9. Bapak Drs. Ikram, M.Si. selaku Dosen Pembahas dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan ilmu, saran, dan nasehat kepada penulis. Berkat ilmu yang Bapak berikan, skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan oleh Allah SWT.
10. Ibu Dra. Anita Damayantie, M. H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan dan saran kepada penulis. Semoga segala kebaikan ibu dibalas oleh Allah SWT.
11. Seluruh dosen Jurusan Sosiologi Universitas Lampung telah memberikan banyak ilmu serta pelajaran kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan. Berkat ilmu yang diberikan, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Mama tercinta, Yanti Sugiarti yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah ada habisnya kepada penulis agar penulis selalu semangat dalam segala proses. Terimakasih karena selalu menjaga penulis dalam setiap doanya dan membiarkan penulis mengejar impiannya.

13. Papa tercinta, Yoga M Supriatman yang telah bekerja keras agar penulis dapat kuliah sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah menjadi panutan untuk selalu semangat dalam segala proses dan selalu memberikan semangat dan nasehat dalam kehidupan penulis dari kecil hingga dewasa dan selamanya.
14. Teteiku, Fitri Rabbani yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang dengan caranya sendiri Terimakasih karena sudah memberikan nasehat kepada penulis.
15. Adikku. Nayla Agnia Revanti yang sudah menjadi pelengkap dan penyemangat hidupku selama dirumah, semoga segala impianmu tercapai Aamiin.
16. Terimakasih kepada segala pihak dari Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaleer Kota Bandung atas ketersediannya memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian.
17. Terimakasih untuk teman-teman dan sahabatku Cici Intan, Hilda Syarifah dan Nur Azizah Agustina sudah menjadi sahabat terbaik yang pernah saya kenal, sehat dan sukses selalu untuk kalian semua.
18. Teman seperjuangan Yeni Swisty Nurwijayanty, Fadillah Azhari Putri, Nabila Rizkia Putri. Terimakasih untuk kebersamaan kita selama berjuang bareng, saling dukung, saling membantu dalam proses perkuliahan. Semangat untuk kita semua.
19. Terimakasih kepada teman-teman Sosiologi 2017 atas segala bantuan dan telah menjadi teman yang baik dibangku perkuliahan. Semoga kalian sukses selalu.
20. Untuk teman-teman dan keluarga KKN tahun 2020 Desa Tri Mukti Jaya Aul, Mey, Riska, Tika, Pando dan Ferdi. Terimakasih untuk 40 harinya yang sangat berkesan dan bermakna, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kebersamaan, kekeluargaan, kesabaran dan kekompakkan. Semoga kita bisa berkunjung ke Tulang Bawang lagi.
21. *Spotify* dengan lagu-lagunya yang menemani penulis dalam pengerjaan skripsi ini
22. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Sekali lagi terimakasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bandar Lampung, 10 Juni 2022

Penulis,

Zulfa Fauzia

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Bantuan Sosial	6
2.2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial	7
2.3. Konflik dan Kronologi Konflik	9
2.3.1. Definisi Konflik	9
2.3.2. Kronologi Konflik.....	10
2.4. Model Penyelesaian Konflik	13
2.4.1. Negosiasi	14
2.4.2. Mediasi.....	16
2.4.3. Albitrasi.....	16
2.4.4. Legal.....	16
2.5. Kerangka Berpikir	17

III. METODE PENELITIAN	19
3.1. Metode Penelitian.....	19
3.2. Lokasi Penelitian	20
3.3. Fokus Penelitian	20
3.4. Penentuan Informan Penelitian	20
3.4.1 Kriteria Informan	20
3.4.2 Informan Penelitian.....	21
3.4.3 Teknik Perolehan Informan.....	22
3.5. Teknik Pengumpulan Data	22
3.6. Teknik Analisis Data	24
IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN	26
4.1. Profil Informan	26
4.2. Gambaran Umum Kelurahan Kopo.....	29
4.3. Kependudukan Kelurahan Kopo	31
4.3.1. Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga	31
4.3.2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	32
4.3.3. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Profesi.....	33
4.3.4. Penduduk Berdasarkan Agama	33
4.3.5. Penduduk Berdasarkan Umur	34
4.3.6. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
4.4. Data Keluarga Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 Kelurahan Kopo.....	36
4.5. Data Keluarga Penerima Bantuan Provinsi Kelurahan Kopo	37
4.6. Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat.....	38
4.7. Penyaluran Bantuan Sosial Provinsi	40
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
5.1. Kronologi konflik di Kelurahan Kopo	43
5.1.1. Tahap Prakonflik.....	45
5.1.2. Tahap Konfrontasi.....	49
5.1.3. Tahap Krisis	53
5.1.4. Tahap Akibat.....	67
5.2. Metode Penyelesaian Konflik	69

VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
6.1. Kesimpulan.....	73
6.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1 Teknik Pengumpulan Data.....	23
Tabel 2 Penggunaan Areal Tanah	29
Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Kopo	31
Tabel 4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Kopo	32
Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Profesi di Kelurahan Kopo...	33
Tabel 6 Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Kopo	34
Tabel 7 Penduduk Berdasarkan Umur di Kelurahan Kopo.....	34
Tabel 8 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Kopo.....	35
Tabel 9 Data Keluarga Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 di Kelurahan Kopo	36
Tabel 10 Data Keluarga Penerima Bantuan Provinsi di Kelurahan Kopo	37
Tabel 11 Banyak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Provinsi di Kelurahan Kopo	38
Tabel 12 Persepsi dan Penilaian Penyebab Konflik.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Tahapan-Tahapan Konflik.....	13
Gambar 2 Kerangka Berpikir	18
Gambar 3 Peta Kelurahan Kopo	29
Gambar 4 Bansos Termin 2.....	41
Gambar 5 Bansos Termin 3.....	42
Gambar 6 Kronologi Konflik Berdasarkan Urutan-Urutan Waktu.....	44
Gambar 7 Alur Tahap Konfrontasi	52

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam masyarakat, konflik merupakan suatu yang tidak dapat dihindari bagi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu, dan manusia sebagai makhluk sosial yang membangun hubungan sosial dengan orang lain, tidak dapat dipisahkan dari kepentingan orang lain. Konflik menemani mereka kapan saja, di mana saja, selama orang memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya, kebutuhan material masyarakat berupa kekayaan dapat memberitahu kita bahwa kebanyakan orang memiliki kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Perbedaan kepentingan adalah salah satu faktor utama yang dapat menimbulkan konflik sosial. Konflik sosial berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi-aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Pruitt, 2009 : 10). Artinya, konflik sosial terjadi karena banyak faktor, sehingga konflik bersifat kompleks dan melibatkan banyak komponen masyarakat yang berbeda. Seperti di masa pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang terkena dampak dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Pandemi Covid-19 disebabkan oleh virus SARSCoV2. Virus tersebut pertama kali menginfeksi individu di Wuhan, sebuah kota di Republik Rakyat Tiongkok, dan sejak itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Untuk menekan penyebaran virus ini, Indonesia telah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu oleh penduduk di wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, Efisiensi masyarakat di sektor ekonomi menurun, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya skala ekonomi dalam skala nasional. Seperti yang dijelaskan dalam video '*Be Careful of the next 2 Years*' yang diposting di saluran resmi YouTube Nasdas official, pernyataan ini menunjukkan bahwa COVID-19 belum menghilang dari planet ini setidaknya selama dua tahun. Dampak terhadap kondisi sosial seperti kemiskinan dan pengangguran, keduanya dapat terjadi di Indonesia.

Perubahan yang terjadi di masa pandemi ini memang tidak hanya pada sektor ekonomi. Ketahanan pangan di rumah saat pandemi menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan pangan tidak bisa ditunda. Pemerintah diberbagai lapisan mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai desa melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kebutuhan pangan yang meningkat di masa pandemi ini. Ini merupakan upaya pemerintah yang memberikan kenyamanan besar kepada masyarakat miskin yang terkena dampak krisis COVID-19, karena dapat meringankan beban ekonomi dalam situasi yang berat, serta banyaknya dana penanggulangan kemiskinan yang terkena dampak krisis COVID-19. Mengantisipasi lonjakan angka kemiskinan akibat pandemi yang diperkirakan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah bantuan sosial yang disiapkan pemerintah saat ini, penduduk miskin dan rentan miskin yang layak untuk mendapatkan bantuan sosial, pemerintah perlu meningkatkan anggaran bantuan Sosial dan memperluas jumlah penerima bantuan kepada penduduk yang jatuh miskin akibat COVID-19 (Yusuf Imam Santoso, 2020 Mei 05).

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi masyarakat, namun pelaksanaannya belum optimal. Pemerintah mengalokasikan dana untuk penyaluran bansos dalam penanganan pandemi virus corona sebesar Rp. 203,9 triliun (Mochamad Januar Rizki, 2020 Mei 05). Namun, besaran dan luasnya dampak membuat sulit untuk mengklasifikasikan masyarakat miskin yang terkena dampak, secara dramatis

mengubah status sosial masyarakat, dan berdampak luar biasa pada munculnya konflik sosial di wilayah tersebut.

Di Bandung sendiri, validasi data menjadi masalah serius dalam memberikan dukungan sosial kepada mereka yang terdampak COVID-19. Bantuan sosial di masa pandemi ini belum maksimal. Di Bandung sendiri, validasi data menimbulkan masalah serius dalam memberikan dukungan sosial kepada mereka yang terkena dampak Covid19. Bantuan sosial di masa pandemi ini belum maksimal. Pola distribusi, pendataan, dan koordinasi antar lini masih belum sinergis. Pasalnya, menurut Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tercatat sebanyak 238.000 orang terdampak pandemi Covid-19 secara ekonomi yang dikategorikan ke dalam miskin baru dan penerima bantuan sosial dari pemerintah (Nina Rohmana, 2020 oktober 21). Namun, banyak data yang tidak memenuhi kriteria, bahkan ada yang mengaku menjadi masyarakat miskin demi mendapatkan bantuan sosial. Beberapa kasus lainnya, seperti penerima telah pindah alamat atau orang sudah meninggal masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial.

Pertentangan di tengah masyarakat tergambar saat terjadi penolakan bantuan berupa sembako serta protes oleh warga Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung saat diantarkan petugas Pos Indonesia (Dea Andriyawan, 2020 April 23). Sehingga memicu pertentangan dan pergejolakan di tengah masyarakat. Pemberian bantuan sosial menimbulkan sebuah konflik horizontal yang mengacu pada kecemburuan sosial. Konflik secara horizontal ini dipicu atas ketidakmerataan pemberian bantuan sosial yang biasanya sering terjadi saat proses pemberian bantuan sosial. Selain itu juga memicu konflik sosial vertikal, yaitu konflik yang mengarah terhadap masyarakat dan pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh penanganan pemerintah terhadap wabah pandemi corona yang dinilai lambat oleh masyarakat. Sehingga memicu salah paham kepada pemerintah (Ida Ruwida, 2020 April 16). Melihat permasalahan tersebut, maka perlu adanya tindak lanjut dari Dinsosnangkis untuk melakukan validasi data bagi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Apabila terus

dibiarkan, maka akan timbul permasalahan konflik di tengah masyarakat dengan pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini diperoleh beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan yakni antara lain:

1. Bagaimana kronologi konflik bantuan sosial provinsi Covid-19 di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?
2. Bagaimana penyelesaian konflik bantuan sosial provinsi Covid-19 di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah ini dan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji kondisi objektif konflik antara pihak-pihak yang berkonflik pada masyarakat Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.
2. Mengetahui penyelesaian konflik bantuan sosial Provinsi Covid-19 di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris yang relevan dengan analisis ilmu sosial. Ketika erat kaitannya

dengan proses manusia dan kehidupan sehari-hari bagaimana penanganan konflik yang terjadi di Kota Bandung.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini akan menginformasikan kepada pembaca tentang bagaimana bantuan sosial juga dapat menyebabkan konflik sosial selama pandemi Covid-19 yang terjadi di Kota Bandung. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk proses penelitian lainnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bantuan Sosial

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi Indonesia secara keseluruhan, memajukan jaminan sosial dan melindungi masyarakat dari risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu pos yang dinamakan bantuan sosial di dalam APBN (UU No 11 tahun 2009).

Bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (PMK Nomor 81/PMK.05/2012). Risiko sosial yang dimaksud di sini adalah kerawanan krisis sosial yang dialami oleh individu, keluarga, kelompok atau masyarakat sebagai akibat dari peristiwa sosial, ekonomi, politik, alam dan bencana alam. Ini menjadi lebih buruk tanpa dukungan sosial dan anda tidak dapat hidup dalam kondisi kehidupan yang layak.

Menyebarnya virus COVID-19 di Indonesia telah menyebabkan kepanikan dan kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dengan memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang terdampak. Dalam rangka menangani pengaruh covid-19, pemerintah menaikkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM).

Program Sembako merupakan program pendampingan masyarakat pangan yang mengembangkan bantuan pangan non tunai dengan menambahkan biaya bantuan dan jenis pangan. Program sembako diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fungsi uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai sarana penyaluran bansos. Program Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta dan meningkatkan nilai bantuan sebesar 33% (dari Rp150.000 menjadi Rp200.000). Sementara itu, pada PKH, pemerintah meningkatkan jumlah KPM dari 9,2 juta menjadi 10 juta, meningkatkan nilai bantuan sebesar 25%, dan mengubah frekuensi pencairan menjadi per bulan, sedangkan sebelumnya, per tiga bulan (Hastuti, Ruhmaniyati & Dyan Widyaningsih, 2020 : 2).

Di Jawa Barat terdapat delapan bantuan, yakni Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, kartu sembako perluasan, bansos sembako presiden, dana desa (bagi kabupaten), bantuan tunai dari kemensos, bansos provinsi serta bansos dari kabupaten/kota. Penerima setiap pintu bantuan, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non-DTKS, untuk penerima bansos di setiap kabupaten/kota (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020 Juni 04). Perluasan cakupan bantuan sembako sebagai upaya untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama pandemi COVID-19 bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin, terutama untuk kebutuhan pangan dan kesehatan.

2.2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial

Dalam menjalankan mekanisme ini dipakai untuk menjadi tuntunan, arahan, atau rambu-rambu teknis pelaksana program, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bank penyalur, dan pihak terkait lainnya. Mekanisme ini adalah susunan dalam pedoman umum program sembako bantuan sosial provinsi.

Bantuan ini melalui tahapan-tahapan dan syarat agar penerima bisa mendapatkan bantuan sosial provinsi yaitu (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, April 2020) :

1. Masyarakat yang berhak menerima bantuan adalah penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak gejala sosial dan ekonomi akibat Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah.
2. Bantuan Provinsi berupa Sembako maupun Tunai. Penerima Manfaat Sembako dari Provinsi Jawa Barat akan mendapatkan dalam jangka waktu 4 bulan sebesar Rp. 500.000 / KK / bulan, dengan rician yaitu : pertama, berupa bantuan uang tunai : Rp. 150.000 / KK / bulan. Kedua, bantuan pangan non-tunai (sembako) : Rp. 350.000 / KK / bulan. Di Jawa Barat jumlah penduduk yang merupakan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) dari program ini adalah 2.348.298 KRTS.
3. Mekanisme sesuai dengan peraturan yang telah di tentukan menurut sumber informasi dari narasumber di lapangan
 - Mekanisme penentuan penerima bantuan manfaat adalah daftar Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau terdaftar sebagai non-DTKS didaftarkan oleh Dinas Sosial Jawa Barat. DTKS telah diverifikasi dan dikonfirmasi oleh Dinas Sosial dan akan disalurkan sesuai dengan penerimanya.
 - Untuk data non-DTKS, sudah didaftarkan oleh dinas sosial, tetapi daftar penerima akhir akan diperiksa dan dikonfirmasi oleh RW dan pemerintah desa dengan dukungan organisasi pemuda PSM, Tagana dan Puskesmas setempat, untuk memverifikasi keakuratannya. kondisi dan fakta / alamat yang bersangkutan.
 - RW dan Pemerintah Desa dapat memfasilitasi penambahan masyarakat yang dianggap layak namun belum terdata pada data non-DTKS Dinas Sosial.
 - Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Provinsi yaitu bantuan tunai dan non tunai akan disalurkan langsung kepada penerima manfaat

melalui PT. POS Indonesia di sebagian lokasi untuk bantuan program non tunai (sembako) akan disalurkan melalui ojol (Ojek Online).

4. Bantuan akan disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan jadwal berikut :

- Termin 1 : Minggu ke-3 April 2020
- Termin 2 : Minggu ke-2 Mei 2020
- Termin 3 : Minggu ke-2 Juni 2020
- Termin 4 : Minggu ke-2 Juli 2020

2.3. Konflik dan Kronologi Konflik

2.3.1. Definisi Konflik

Manusia adalah makhluk konflikologis (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa. Dalam kamus umum bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta (1976), konflik berarti pertentangan atau percekocokan. Pertentangan sendiri bisa muncul kedalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara dua belah pihak b mersebrangan. Francis menambahkan unsur persinggungan dan pergerakan sebagai aspek tindakan sosialnya (Francis, 2006 : 7). Jadi, secara sederhana, konflik adalah permasalahan yang ditandai dengan pergerakan beberapa bagian, yang mengarah ke persimpangan.

Pruitt dan Rubin mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham (Pruitt dan Rubin, 2009: 9). Kepentingan yang dimaksud adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya diinginkan, dimana perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niatnya. Konflik

adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain yang mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat atau dalam hubungan antar individu. (Antonius Atosokhi Gea, 2002 : 175).

Definisi konflik di atas mengarah pada kesimpulan bahwa konflik adalah suatu keadaan yang diakibatkan oleh pertentangan antara keinginan, atau tujuan yang ingin dicapai sehingga menimbulkan ketidaknyamanan baik secara individu maupun antar kelompok.

2.3.2. Kronologi Konflik

Kronologi konflik dilihat dari tahapan konflik berawal pra-konflik hingga konflik puncak atau fase krisis dalam penelitian ini. Tahapan konflik itu sendiri terdiri dari lima tahapan yang masing-masing merupakan periode aktivitas, intensitas, dan kekerasan dengan intensitas yang berbeda-beda dan dapat digunakan untuk menganalisis dinamika dan insiden konflik yang berbeda-beda.

Tahap-tahap pada konflik ini penting sekali diketahui dan digunakan bersama alat bantu lain untuk menganalisis berbagai dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap konflik. Analisis dasar terdiri dari lima tahap yang umumnya disajikan secara beruntun disini. Tahapan konflik yang setiap tahapnya dipaparkan secara berurutan (Fisher, dkk, 2001 : 19), bahwa, yaitu :

1. Tahap Prakonflik

Pada tahap ini, timbul ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, sehingga menimbulkan konflik. Ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran di antara dua belah pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan di

antara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini

Mungkin ada ketegangan antara kedua pihak atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Tahap pra-konflik dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab terjadinya konflik karena adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antar manusia. Menurut Diana Francis (2006 : 29), sebab-sebab terjadinya konflik antara lain :

a. Komunikasi

Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti dan informasi yang tidak lengkap. Komunikasi yang menjadi pemicu konflik adalah karena adanya hambatan komunikasi yang muncul antara pemerintah dengan masyarakat atau sesama warga negara. Komunikasi dapat menimbulkan konflik baik secara vertikal maupun horizontal.

b. Struktur

Perebutan kekuasaan antara pemangku kepentingan atau sistem konflik, persaingan untuk sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dari dua atau lebih kelompok kerja yang bekerja untuk mencapai tujuan mereka.

c. Pribadi.

Ketidaksesuaian tujuan atau nilai sosial individu dengan perilaku di mana mereka terlibat dan perubahan nilai yang dirasakan.

2. Tahap Konfrontasi

Pada tahap ini, konflik lebih terbuka, dan jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, para pendukung dapat melancarkan protes atau kegiatan konfrontatif lainnya. Terkadang ada perkelahian atau kekerasan tingkat rendah lainnya antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak dapat mengumpulkan sumber daya pasukan dengan harapan bahwa konfrontasi dan kekerasan akan meningkat. Ketika

hubungan antara kedua belah pihak meningkat, para pendukung menjadi terpolarisasi.

3. Tahap Krisis

Tahap ini adalah puncak konflik, dengan ketegangan dan kekerasan terbesar. Konflik Besar-besaran adalah era perang orang tewas di kedua sisi. Komunikasi normal antara dua pihak dapat terganggu. Ada pernyataan yang cenderung menyalahkan dan menentang pihak lain.

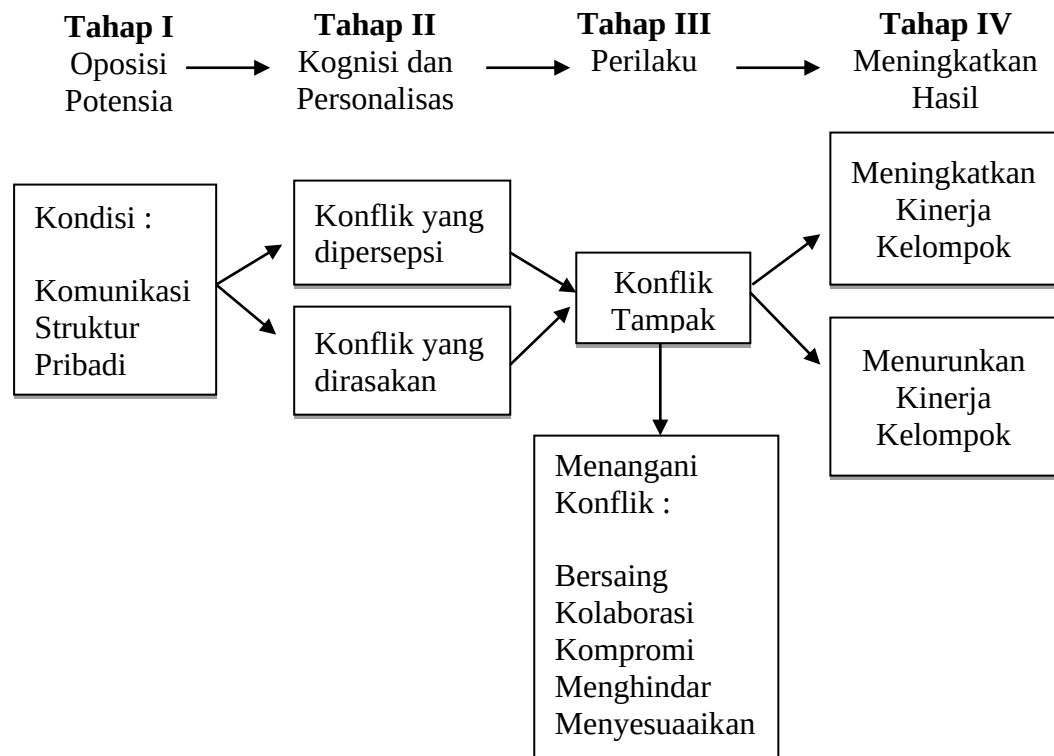
4. Tahap Akibat

Kedua belah pihak dapat setuju untuk bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Pihak yang berkompeten atau pihak ketiga yang lebih berkuasa dapat memaksa kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan. Satu pihak mungkin menyerah atau menyerah atas desakan pihak lain. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga lainnya yang lebih berkuasa mungkin memaksa kedua belah pihak menghentikan pertikaian. Apapun keadaannya, tingkat ketegangan, konfrontasi dan kekerasan pada tahap ini agak menurun dengan kemungkinan adanya penyelesaian.

5. Tahap Pascakonflik

Pada akhirnya, situasi tersebut diselesaikan dengan mengakhiri berbagai bentrokan kekerasan, ketegangan mereda dan hubungan kedua belah pihak menjadi lebih normal. Namun, jika masalah dan isu muncul karena tujuan yang saling bertentangan tidak diselesaikan dengan baik, langkah ini sering kembali ke situasi pra-konflik.

Tahap-tahap konflik dari hal-hal yang mendahului sampai hasil akhir digambarkan dengan diagram oleh Robbins (1998: 437) adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Tahapan-Tahapan Konflik

Sumber : Robbins, Organizational Behavior, 1998: 437

2.4. Model Penyelesaian Konflik

Dalam rangka mengakhiri permasalahan yang sedang berlangsung, dilakukan upaya-upaya penyelesaian permasalahan. Mengatasi atau menuntaskan permasalahan bukan sesuatu yang sederhana. Cepat atau tidaknya suatu permasalahan bisa diselesaikan ditentukan dengan kesedian dan keterbukaan pihak-pihak yg bersengketa untuk menuntaskan permasalahan yang berat maupun ringan bobot atau taraf permasalahan tersebut. Moore dalam *The Study on Mining Licence Overlaps* mengatakan bahwa pendekatan resolusi konflik terbagi menjadi empat yaitu, negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pendekatan legal (Ansori, Rotinsulu, dan Haryadi, 2013).

2.4.1. Negosiasi

Negosiasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan konflik. Negosiasi dilakukan oleh para pihak yang berkonflik untuk menyampaikan keinginan para pihak yang berkonflik dan pada akhirnya para pihak yang berkonflik akan mencapai suatu keputusan yang disepakati bersama. Tujuan negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Negosiasi dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih tanpa pihak lain yang mengadili sengketa tersebut. Biasanya pihak-pihak yang bernegosiasi memiliki kepentingan yang berbeda. (Nadia Rachma, 2017 : 22).

Dalam melakukan negosiasi terdapat tiga variabel yang memungkinkan terjadinya keberhasilan dalam bernegosiasi. Pertama, kedua belah pihak harus bersedia untuk mencari sebuah solusi dalam menyelesaikan konflik. Kedua, pihak-pihak harus memiliki sumberdaya manusia, keuangan, dan administrasi untuk mencari resolusi. Ketiga, kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang tinggi mengenai permasalahan yang terjadi dan kedua belah pihak harus memiliki kemauan untuk mencari solusi dan memiliki sumberdaya yang memadai juga pemahaman bersama (kontekstual dan teknis) agar mencapai resolusi bersama. Namun apabila sebaliknya, jika kedua belah pihak tidak ada rasa keinginan bersama untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Dimana kedua belah pihak memiliki keinginan rendah untuk memahami sebuah konflik, maka akan ditanggguhkan kepada pihak ketiga (Barron, dkk, 2004 : 30). Tahap-tahap untuk menjalankan negosiasi (Fisher, dkk, 2000 : 116) :

1. Persiapan

- Lakukan analisis terhadap situasi konflik mungkin dengan mematakannya
- Lakukan riset/pengumpulan informasi, sebagaimana perlunya

- Identifikasi berbagai kebutuhan dan kepentingan suatu pihak dan pihak lainnya
- Pertimbangan pilihan yang lebih anda sukai tentang hasil negosiasi dan juga alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan yang telah dinegosiasikan
- Lakukan kontak dengan pihak lainnya dan tentukan tempat untuk bertemu untuk melakukan proses negosiasi, termasuk aturan mainnya, isu-isu yang akan dibicarakan, berapa banyak orang yang dapat mengahadirinya atau bertindak sebagai juru bicara mewakili pihaknya, dan pikirkan apakah seorang fasilitator akan diperlukan.

2. Interaksi

- Ketika sampai ditempat pertemuan, saling bersalaman sesuai dengan kebiasaan setempat
- Ungkapkan berbagai pandangan yang berbeda tentang situasi yang sama
- Sepakati masalah masalah yang ada
- Munculkan kemungkinan-kemungkinan untuk mengatasi masalah
- Lakukan evaluasi dan tentukan prioritas pilihan-pilihan yang ada, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan semua pihak
- Pilih dan kombinasikan pilihan-pilihan terbaik untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat

3. Penutupan

- Sepakati pilihan atau gabungan pilihan yang disepakati
- Susun rencana tindakan untuk semua pihak
- Tentukan waktu dan batas waktu untuk melakukan tindakan

2.4.2. Mediasi

Mediasi ialah suatu proses dimana pihak-pihak tersebut didampingi dan dibantu oleh pihak ketiga, dimana secara sistematis mengisolasi sengketa atau konflik untuk mengembangkan dan mempertimbangkan opsi-opsi penyelesaian yang dapat mencapai penyelesaian konsensual yang akan mengakomodasi kebutuhan masing-masing pihak yang bersengketa atau beronflik.

Dalam melakukan mediasi, ada beberapa kriteria penting. Pertama, mediasi harus bersifat sukarela. Kedua belah pihak harus menyepakati pemilihan mediator. Ketiga, mediator hadir untuk memfasilitasi diskusi antara para pihak yang bersengketa dan memungkinkan para pihak untuk bertemu dan melakukan diskusi untuk mengusulkan solusi atau mencapai kesepakatan.

2.4.3. Albitrasi

Suatu usaha oleh dua pihak atau lebih untuk mempertemukan para pihak yang berkonflik dan dengan bantuan pihak ketiga disebut mediator. Fungsi dari pihak ketiga adalah untuk menjembatani keinginan kedua belah pihak dan pihak albitrasi yang memberikan persetujuan dengan menilai kekurangan dan kelebihan dari para pihak yang berkonflik. Hasil dari keputusan pada pihak ketiga mengikat secara hukum (Moore dalam Ansori, Rotinsulu, dan Haryadi, 2013).

2.4.4. Legal

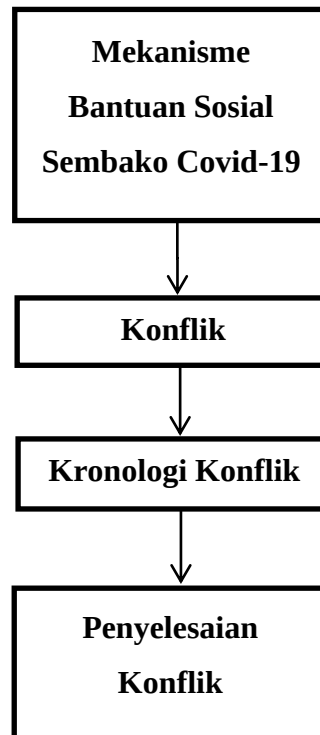
Pendekatan legal merupakan langkah terakhir ketika negosiasi, mediasi dan albitrasi tidak lagi berhasil menyelesaikan suatu konflik. Dalam penyelesaian konflik dengan cara legal, pihak ketiga adalah lembaga pengadilan. Pihak ketiga adalah hakim yang akan memutuskan

berdasarkan kekurangan dan kelebihan dari pihak yang berkonflik dan keputusan hakim ini mengikat secara hukum. Dengan demikian, penyelesaian menggunakan pendekatan secara legal akan mencapai hasil pada *win-lose solution* (Moore dalam Ansori, Rotinsulu, dan Haryadi, 2013).

2.5. Kerangka Berpikir

Konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang selalu hadir dan sulit dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, konflik tidak muncul dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor di baliknya. Penulis berpendapat bahwa ada beberapa alasan di balik konflik terkait bantuan sosial provinsi di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler kota bandung tersebut. Masyarakat dan pemerintah terlibat sepenuhnya dalam konflik ini.

Setiap jenis penelitian tentunya membutuhkan struktur pemikiran sebagai pengungkit untuk mengarahkan penelitian agar tidak terjadi perluasan pemahaman yang akan mengarah pada penelitian yang tidak fokus. Alur pemikiran dalam penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2 Kerangka Berpikir

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji dan menganalisis fenomena konflik antara warga dan pemerintah. Penelitian melalui pendekatan kualitatif dirancang untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan, dan pemikiran individu dan kelompok orang. Penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi (Farida Nugrahani, 2014 : 4). Jadi, alasan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperdalam pengetahuan tentang suatu fenomena tertentu atau memperoleh wawasan baru tentang gejala-gejala tersebut secara rinci dan juga untuk mengkaji dan menganalisis konteks sebab dan akibat konflik, menelaah dan menganalisis urutan kronologis konflik yang timbul antar pemangku kepentingan.

Dari penjelasan di atas, maka tujuan peneliti dalam menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam tentang penelitian yang menimbulkan konflik Bantuan Sosial Sembako Covid-19 di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di daerah Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Guna memperoleh data, penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang terkena dampak konflik akibat sembako Covid-19. Alasan dipilihnya daerah ini karena Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi dari Provinsi Jawa Barat yang memiliki masyarakat terdampak Covid-19 dan mobilitas hidup yang tinggi sehingga potensi untuk timbulnya konflik sangat besar.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti bagaimana bantuan sosial sembako yang di berikan pemerintah untuk masyarakat terkena dampak Covid-19 justru menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Sehingga, yang menjadi fokus peneltian ini yaitu : mekanisme penyaluran bantuan sosial Covid-19, kronologi konflik, dan bagaimana penyelesaian konflik.

3.4. Penentuan Informan Penelitian

3.4.1 Kriteria Informan

Berkaitan dengan informan, Spradly dalam Faisal (1990 : 57), menyatakan supaya lebih terbukti dalam memperoleh informasinya, maka diajukan beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu :

1. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh suatu kemampuan memberikan inf-ormasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.

2. Subyek yang masih terikat secara penuh atau aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian.
3. Subyek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.
5. Subyek yang sebelumnya tergolong masih "asing" dengan penelitian sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subyek yang semacam "guru baru" bagi dirinya.

3.4.2 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kedudukan sumber data sebagai sumber sama pentingnya dengan individu yang memegang informasi tersebut. Peneliti dan pemberi narasumber berada pada posisi yang sama disini, sehingga narasumber bisa memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan peneliti, tetapi ia dapat mengutamakan perasaan dan rasa dalam menyajikan informasi yang dimilikinya. Informan penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar mengetahui dan memahami masalah, serta berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Informan penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:

- a. Aparat pemerintah daerah Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung
- b. Perwakilan dari pihak-pihak yang berkonflik, baik penerima maupun yang tidak menerima bantuan..

3.4.3. Teknik Perolehan Informan

Teknik pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada referensi dan pertimbangan tertentu, seperti siapa yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan dari penelitian, atau mungkinkah dia adalah pemandu untuk memudahkan peneliti menemukan objek daripada penelitian.

Dengan demikian, informan yang dipilih adalah mereka yang mengetahui, terlibat dalam konflik, dan atau yang menguasai informasi yang berkaitan dengan topik, dan isu penelitian. peneliti memutuskan informan pertama atau informan kunci yang paling sesuai dan tepat ialah Kepala RT 06 di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung informan kunci ini kemudian diminta untuk memberikan rekomendasi terkait informan berikutnya, dengan catatan yang menunjukkan bahwa informan tersebut dipersepsikan dan dievaluasi mengevaluasi kondisi aktual di mana sinkronisasi dan validasi data yang diperoleh dari informan pertama berlangsung.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalan data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam (Farida Nugrahani, 2014: 4). Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dari informan di lokasi penelitian dalam upaya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang konflik yang telah terjadi. Pengumpulan data dibimbing oleh pedoman wawancara yang sudah

dipersiapkan, teknik ini disertai pencatatan konsep, gagasan, pengetahuan informan yang diungkapkan lewat tatap muka. Wawancara mendalam dalam penelitian ini meliputi : 1) Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Covid-19, 2) Kronologi Konflik, 3) Penyebab Konflik, 4) Penyelesaian Konflik.

2. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono 2012 : 82-83) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. seperti : 1) Data masyarakat Penerima Bantuan Sosial Sembako Covid-19, 2) Foto terkait tentang bantuan sosial dan kejadian konflik dan pasca konflik 3. Rekaman video fenomena kejadian konflik dan pasca konflik.

Tabel 1 Teknik Pengumpulan Data

No.	Aspek yang Diteliti	Teknik Pengumpulan Data	Informan Penelitian
1.	Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Covid-19	Wawancara mendalam, Dokumentasi	Aparat pemerintah daerah, Perwakilan masyarakat dari pihak-pihak yang berkonflik
2.	Kronologi Konflik	Wawancara mendalam, Dokumentasi	Aparat pemerintah daerah, Para tokoh informal, Perwakilan masyarakat dari pihak-pihak yang berkonflik,
3.	Konflik antar Pemerintah dengan Masyarakat	Wawancara mendalam, Dokumentasi	Aparat pemerintah daerah, , Perwakilan masyarakat dari pihak-pihak yang berkonflik.

4.	Metode Penyelesaian Konflik	Wawancara mendalam	Aparat pemerintah daerah, Perwakilan masyarakat dari pihak-pihak yang berkonflik.
----	-----------------------------------	-----------------------	---

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010 : 335).

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012 : 334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sebagainya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1994: 10) menyatakan *“the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text”*. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

IV. GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1. Profil Informan

Pada bagian ini akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan dokumentasi yang telah dilakukan terhadap informan, yang mana pertanyaan telah diolah berdasarkan pada rumusan masalah serta fokus penelitian mengenai konflik tata kelola bantuan sosial sembako provinsi. Hasil penelitian yang telah dikumpulkan diolah secara sistematis menurut kaidah penulisan karya ilmiah. Sebelum masuk pada tahap pembahasan, akan dijelaskan profil dari masing-masing informan agar dapat memperkuat fakta dalam penelitian ini yang mana informan berasal dari Pemerintah daerah, Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Provinsi dan Warga yang tidak merima Bantuan Provinsi di Kelurahan Kopo. Informan yang telah diwawancarai diantaranya :

1. Informan 1

Nama	: AR
Usia	: 42 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Posisi	: Ketua RW 12
Pendidikan	: SLTA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Alasan peneliti memilihnya sebagai informan karena beliau terlibat langsung pada setiap penyaluran dan pendistribusian bantuan provinsi dan saat terjadinya konflik. Informan bertugas dalam setiap bantuan provinsi yang datang dari pihak bank sebelum diserahkan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di koordinasi dahulu di kediaman beliau sebagai Ketua

RW. Terdapat 2 anggota keluarga informan yang menerima manfaat bantuan provinsi.

2. Informan 2

Nama : T
 Usia : 40 tahun
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Posisi : Ketua RT 06
 Pendidikan : SLTA
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pedagang

Alasan peneliti memilihnya sebagai informan karena beliau terlibat langsung pada setiap penyaluran dan pendistribusian bantuan provinsi dan saat terjadinya konflik. Informan bertugas dalam setiap bantuan provinsi yang datang dari pihak bank sebelum diserahkan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di koordinasi dahulu di kediaman Ketua RW dan bertugas langsung mengkoordinasi warga yang layak atau tidak untuk menerima bantuan provinsi agar data selalu valid dan tepat sasaran.

3. Informan 3

Nama : ES
 Usia : 40 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Posisi : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Provinsi
 Pendidikan : SD
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alasan peneliti memilihnya sebagai informan karena beliau merupakan Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Provinsi sebanyak 4 kali namun karena terjadi penolakan di pencairan pertama beliau hanya menerima bantuan 3 kali. Informan menerima bantuan provinsi dalam bentuk tunai dan non tunai. Dari informan peneliti berharap dapat

mendapatkan informasi terkait bagaimana beliau menerima bantuan provinsi.

4. Informan 4

Nama : ES
 Usia : 80 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Posisi : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Provinsi
 Pendidikan : SD
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan

Alasan peneliti memilihnya sebagai informan karena beliau merupakan Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Provinsi sebanyak 3 kali. Informan menerima bantuan provinsi dalam bentuk tunai dan non tunai. Dari informan peneliti berharap dapat mendapatkan informasi terkait bagaimana beliau menerima bantuan provinsi.

5. Informan 5

Nama : PS
 Usia : 63 tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Posisi : Bukan Keluarga Penerima Bantuan Provinsi
 Pendidikan : SLTP
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pensiunan

Alasan peneliti memilihnya sebagai informan karena beliau bukan merupakan Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Provinsi sebanyak 3 kali. Informan menerima bantuan provinsi dalam bentuk tunai dan non tunai. Dari informan peneliti berharap dapat mendapatkan informasi terkait bagaimana beliau menerima bantuan provinsi.

4.2. Gambaran Umum Kelurahan Kopo

Secara geografis Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler memiliki bentuk wilayah datar / berombak sebesar 92,5% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kelurahan Kopo berada pada ketinggian 500 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kelurahan Kopo berkisar 25oC, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 240 mm/tahun dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari. Kelurahan.Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler merupakan salah satu bagian wilayah Tegallega Kota Bandung dengan memiliki luas lahan sebesar 92 Ha. Pembagian penggunaan areal tanahnya sebagai berikut :

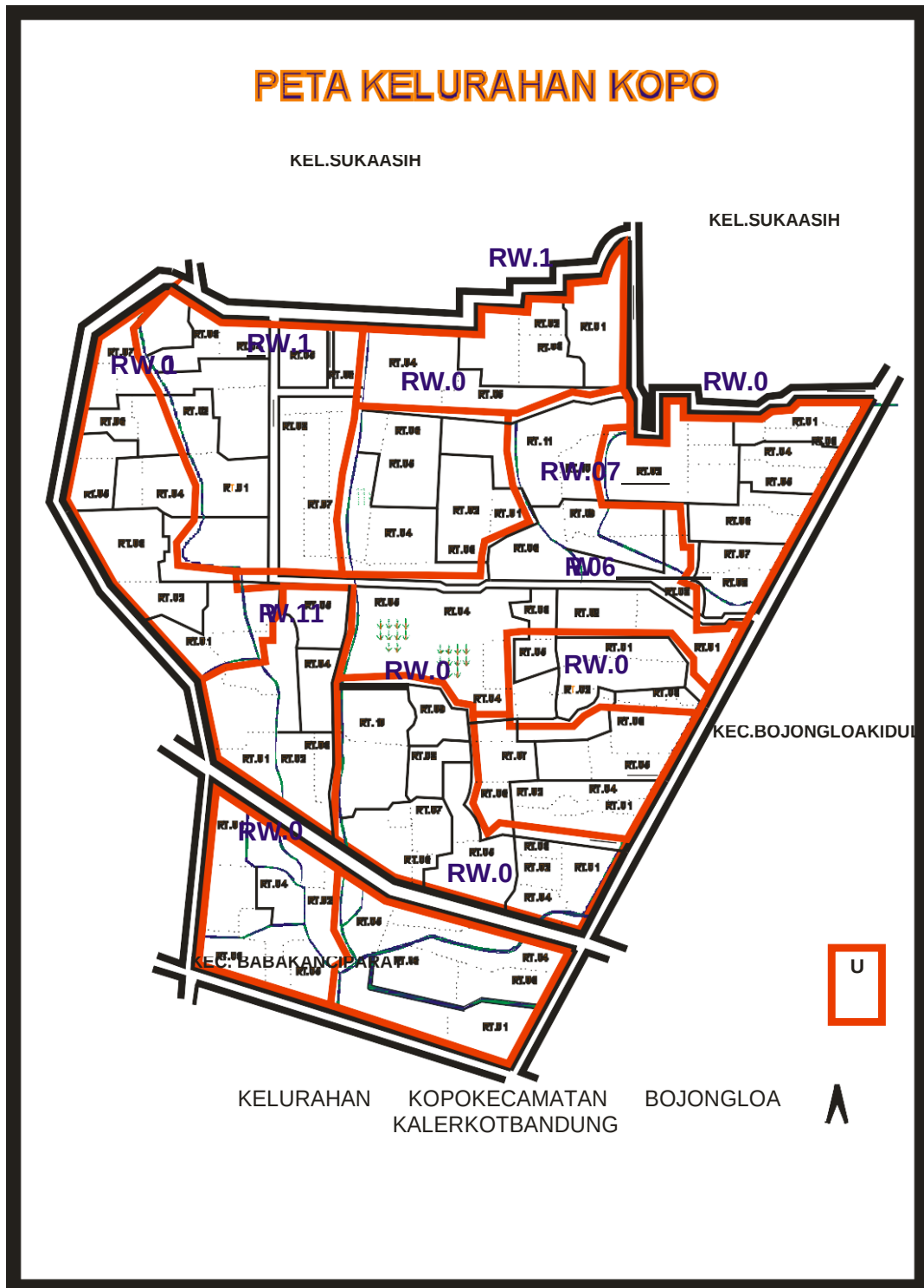
Tabel 2 Penggunaan Areal Tanah

No	Penggunaan	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah	1
2	Tanah Kering (Daratan)	81,83
3	Tanah Basah	1
4	Fasilitas Umum	8,17

Sumber : Profil Kelurahan Kopo 2021

Secara administratif Kelurahan .Kopo dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kelurahan Babakan Ciparay
- Bagian Utara : Kelurahan Suka Asih
- Bagian Timur : Kelurahan Situsaur
- Bagian Barat : Kelurahan Babakan Ciparay



Sumber : Profil Kelurahan Kopo 2021

4.3. Kependudukan Kelurahan Kopo

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan peneliti dengan Sekertaris Kelurahan Kopo, maka didapatkan data kependudukan sebagai berikut :

4.3.1. Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga

Kelurahan Kopo memiliki jumlah penduduk sebanyak 29.468 Jiwa yang dibagi kedalam 12 Rukun Warga dan 86 Rukun Tetangga. Berikut adalah rincian data :

Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Kopo

RT	RW	Jumlah Kepala Keluarga		
		WNI	WNA	Jumlah
8	1	570	0	570
5	2	549	0	549
6	3	510	0	510
10	4	623	0	623
7	5	507	0	512
5	6	510	0	510
12	7	576	0	576
8	8	551	0	551
7	9	597	0	620
5	10	540	0	540
5	11	380	0	380
8	12	761	0	761
86	12	6674	0	6702

Sumber : Data Sekretariat Kelurahan Kopo Tahun 2021

4.3.2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada tahun 2021 menurut data kependudukan Kelurahan Kopo memiliki jumlah penduduk sebanyak 32.420 jiwa yang terdiri dari 16.155 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 15.483 berjenis kelamin perempuan. Melihat dari data di bawah ini Kelurahan Enggal di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Kopo

Jumlah		Jumlah Penduduk Tetap			Jumlah Penduduk Tidak Tetap		
RT	RW	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
8	1	1.342	1.463	2.805	170	66	236
5	2	850	876	1.726	160	16	176
6	3	1.058	1.348	2.406	164	64	228
10	4	1.420	1.787	3.207	172	52	224
7	5	960	1.146	2.106	101	30	131
5	6	2.457	1.176	3.633	81	24	105
12	7	1.021	1.254	2.673	85	60	145
8	8	986	1.150	2.136	195	43	238
7	9	1.019	1.280	2.299	104	30	134
5	10	1.238	1.149	2.387	103	23	126
5	11	860	1.043	1.903	163	40	203
8	12	1.245	1.340	2.585	201	23	224
Total		14.456	15.012	29.468	1.699	471	2.170

Sumber : Data Sekretariat Kelurahan Kopo Tahun 2021

4.3.3. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Profesi

Profesi di Kelurahan Kopo di dominasi oleh pelajar. Dikarenakan banyak anak yang sedang sekolah dibuktikan dengan tingginya jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai pelajar. Sedangkan, untuk mata pencaharian orang dewasa di dominasi oleh pedagang dibuktikan dengan tingginya mata pencaharian pedagang. Berikut adalah jumlah penduduk Kelurahan Kopo menurut mata pencaharian tahun 2021 :

Tabel 5 Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Profesi di Kelurahan Kopo

Mata Pencaharian Profesi	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Pegawai Negeri	725	814	1.539
ABRI, POLRI	424	550	974
Pegawai Swasta	1.445	1.776	3.221
Tani	155	71	226
Dagang	1.829	1.886	3.715
Pelajar	3.479	4.965	8.444
Mahasiswa	1.294	1.280	2.574
Pensiun	1.118	1.156	2.274
Lain-lain	5.448	4.005	9.453
Total	15.917	16.503	32.420

Sumber : Data Sekretariat Kelurahan Kopo Tahun 2021

4.3.4. Penduduk Berdasarkan Agama

Kondisi keagamaan penduduk Kopo cukup beragam, meskipun masih didominasi oleh agama tertentu. Keberagaman ini dibuktikan dengan adanya pemeluk agama lain di Kelurahan Kopo. Berikut adalah rincian jumlah penduduk berdasarkan agama :

Tabel 6 Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Kopo

RW	Jumlah Menurut Golongan Agama					Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	
1	2.648	220	110	0	0	2.978
2	1.978	214	87	0	0	2.279
3	2.381	244	90	0	0	2.715
4	2.783	265	89	0	0	3.137
5	2.374	233	88	0	0	2.695
6	3.395	212	99	0	0	3.706
7	2.240	205	71	0	0	2.516
8	2.235	215	89	0	0	2.539
9	2.231	224	100	0	0	2.555
10	2.214	201	97	0	0	2.512
11	1.664	215	95	0	0	1.974
12	2.273	236	198	55	52	2.914
Total	28.416	2.684	1.213	55	52	32.420

Sumber : Data Sekretariat Kelurahan Kopo Tahun 2021

4.3.5. Penduduk Berdasarkan Umur

Menurut tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa struktur penduduk yang paling banyak adalah berusia 0-4 tahun yaitu sebanyak 3.631 jiwa. Sedangkan yang terendah adalah yang berusia antara 55-24 tahun yaitu sebanyak 15.505 jiwa.

Tabel 7 Penduduk Berdasarkan Umur di Kelurahan Kopo

No	Umur	L	P	Jumlah
1	0-4	2.246	1.385	3.631
2	5-9	1.042	1.086	2.128
3	10-14	1.500	1.384	2.884

4	15-19	1.180	1.479	2.659
5	20-24	1.172	1.386	2.558
6	25-29	1.285	1.532	2.817
7	30-34	1.186	1.542	2.728
8	35-39	973	974	1.947
9	40-44	897	993	1.890
10	45-49	995	979	1.974
11	50-54	985	954	1.939
12	55-59	706	799	1.505
13	60-65	699	899	1.598
14	65 Thn ke atas	1.051	1.111	2.162
Total		15.917	16.503	32.420

Sumber : Data Sekretariat Kelurahan Kopo Tahun 2021

4.3.6. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tabel di bawah ini, bahwa pada tahun 2019 masyarakat Kelurahan Enggal mayoritas memiliki tingkat pendidikan tamatan SLTA/Sederajat dengan jumlah keseluruhan penduduknya yaitu 1847 orang. Sedangkan yang melanjutkan pendidikan sampai ketahap perguruan tinggi berjumlah 873 orang. Berikut adalah data jumlah penduduk Kelurahan Enggal berdasarkan tingkat pendidikan :

**Tabel 8 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Kelurahan Kopo**

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	2.011	2.739	4.750
2	Tidak Tamat SD	2.294	2.008	4.302
3	Belum Tamat SD	1.292	1.671	2.963
4	Tamat SD	2.741	2.203	4.944
5	SLTP	2.212	1.855	4.067

6	SLTA	2.472	2.780	5.252
7	Akademi / D3	1.597	1.678	3.275
8	Sarjana / S1	1.298	1.569	2.867
Total		15.917	16.503	32.420

Sumber : Data Sekretariat Kelurahan Kopo Tahun 2021

4.4. Data Keluarga Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 Kelurahan Kopo

Rumah Tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok per sepuluhannya sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke 10 desil (Tim Nasional Percepatan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2020). Pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut :

- Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah
- Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 10-20% terendah
- Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 20-30% terendah dan seterusnya
- Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi

Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat kesejahteraan terendah. (Tim Nasional Percepatan Nasional Penanggulangan Kemiskinan, 2020) Berikut adalah data jumlah data Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 di Kelurahan Kopo :

Tabel 9 Data Keluarga Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4 di Kelurahan Kopo

No	Kategori	Jumlah Keluarga
1	Desil 1	541

2	Desil 2	745
3	Desil 3	431
4	Desil 4	444
Jumlah		2161

Sumber : Data Terpadu Kelurahan Kopo 2021

4.5. Data Keluarga Penerima Bantuan Provinsi Kelurahan Kopo

Program Bantuan Provinsi (Banprov) di Kelurahan Kopo berjalan pada tahun 2020 sebagai upaya pemerintah Provinsi membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berbeda dari setiap penyalurannya sehingga untuk jumlah penerimanya selalu berbeda dikarenakan warga yang menerima pada penyaluran tahap 1 belum tentu dapat pada penyaluran tahap 2 begitupun sebaliknya. Hal ini dikarenakan selalu ada pembaruan data Berikut adalah data penerima Bantuan Provinsi berdasarkan penyalurannya :

Tabel 10 Data Keluarga Penerima Bantuan Provinsi di Kelurahan Kopo

Penyaluran	Jumlah KPM
Tahap 1	2
Tahap 2	1.669
Tahap 3	1.252
Tahap 4	1.924

Sumber : Data Terpadu Kelurahan Kopo 2021

Dalam setiap penyaluran bantuan sosial provinsi tidak semua penerima manfaat hanya mendapatkan bantuan sekali tetapi ada yang menerima bantuan dua kali bahkan tiga kali ini.

Tabel 11 Banyak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) Bantuan Provinsi di Kelurahan Kopo

Banyak KPM menerima bantuan	Jumlah KPM
1 kali	846 KK
2 kali	640 KK
3 kali	579 KK

Sumber : Data Terpadu Kelurahan Kopo 2021

4.6. Kriteria Penerima Manfaat Bantuan Sosial Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan keputusan gubernur Jawa Barat bahwa dalam rangka penyaluran bantuan tunai dan bantuan non tunai bagi masyarakat yang terdampak ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020 tentang Daftar Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

1. Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penerima Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bagi Masyarakat yang Terdampak Ekonomi akibat Pandemi Covid-19, sejumlah 1.907.274 (satu juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat) KRTS.
2. Daftar nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan KRTS sebagaimana berdasarkan :

- a. Identitas NIK yang telah diverifikasi/dicocokkan dengan database NIK yang terdata di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- b. NIK luar Provinsi Jawa Barat dan beralamat lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) yang menjadi domisili pada saat ini di wilayah Provinsi Jawa Barat;
- c. NIK luar Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota tempat domisili saat ini;
- d. Tidak memiliki identitas NIK yang valid namun dapat menunjukkan alamat domisili yang lengkap (RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota) di wilayah Provinsi Jawa Barat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan RT, RW, dan Kelurahan/Desa setempat;
- e. Diusulkan oleh Bupati/Wali Kota kepada Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Dijaring dari usulan masyarakat yang diverifikasi oleh RW atau Perangkat Desa/Kelurahan dan dikompilasi melalui aplikasi Sapawarga;
- g. Dijaring dari aduan masyarakat melalui aplikasi Pikobar;
- h. Hasil pemadanan dengan KRTS penerima bantuan sosial bagi masyarakat terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dari setiap sumber bantuan sosial Pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako (reguler dan perluasan), Bantuan Presiden Sembako, Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- i. Hasil pemadanan dengan KRTS Non DTKS penerima bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bagi masyarakat yang

terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang gagal menerima penyaluran bantuan; dan

- j. Hasil pemadanan lanjutan dari hasil pengujian dan sinkronisasi data usulan penerima bantuan Provinsi Non DTKS Tahap 3 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat.

4.7. Penyaluran Bantuan Sosial Provinsi

Bansos provinsi senilai Rp500.000 merupakan salah satu dari delapan pintu bantuan bagi warga terdampak pandemi. Program Jaringan Pengaman Sosial ini diberikan kepada masyarakat dalam kurun waktu selama 4 bulan mulai dari Bulan April 2020 dan diberikan dalam bentuk uang tunai serta dalam bentuk non-tunai berupa sembako (Yayang & Adi, 2021 : 11). Bantuan ini melalui tahapan-tahapan dan syarat agar penerima bisa mendapatkan bantuan sosial provinsi yaitu (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, April 2020). Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Provinsi yaitu bantuan tunai dan non tunai akan disalurkan langsung kepada penerima manfaat melalui PT. POS Indonesia di sebagian lokasi untuk bantuan program non tunai (sembako) akan disalurkan melalui ojol (Ojek Online).

Bantuan akan disalurkan kepada penerima manfaat sesuai yang sudah disalurkan kepada penerima manfaat bantuan provinsi di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung sebagai berikut :

1. Termin 1 : Minggu ke-3 April 2020

Bantuan berupa sembako dan uang dengan jumlah Rp. 500.000 disalurkan oleh pihak PT.POS sebagai pihak penyalur untuk 3 warga penerima manfaat. Namun ditolak oleh mayoritas warga dan pemerintah daerah setempat sehingga tidak ada warga yang menerima bantuan sosial provinsi di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung pada pencairan bantuan yang pertama.

2. Termin 2 : Minggu ke-2 Mei 2020

Pada termin 2 dan termin seterusnya, penyaluran di salurkan dari pihak PT.POS bekerja sama dengan ojek online. Seharusnya diberikan langsung kepada penerima manfaat secara *door to door*. Namun, untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah. Kelurahan Kopo memutuskan untuk melalui RT dan RW terlebih dahulu karena dianggap resiko terjadinya konflik besar. Bantuan berupa sembako dan uang dengan jumlah Rp. 500.000 yaitu berupa sembako senilai Rp. 350.000 dan uang tunai sebesar Rp, 150.000, jumlah warga yang menerima bantuan di pencairan ke-2 sebanyak 1.669 KK.



Gambar 4 Bansos Termin 2
Sumber : Dokumentasi Informan

3. Termin 3 : Minggu ke-2 Juni 2020

Bantuan berupa sembako dan uang dengan jumlah Rp. 500.000 yaitu berupa sembako senilai Rp, 150.000.dan uang tunai sebesar Rp. 350.000, jumlah warga yang menerima bantuan di pencairan ke-3 sebanyak 1.252 KK.



Gambar 5 Bansos Termin 3
 Sumber : Dokumentasi Informan

4. Termin 4 : Minggu ke-2 Juli 2020

Bantuan berupa uang dengan jumlah Rp. 100.000 tidak beserta dengan sembako, jumlah warga yang menerima bantuan di pencairan ke-4 sebanyak 1.924 KK.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa proses terjadinya konflik Bantuan Sosial Provinsi di Kelurahan Kopo Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tidak terlepas dari tata kelola program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diberikan untuk membantu masyarakat yang berdampak di masa pandemi. Konflik yang terjadi melalui tahapan-tahapan yang menggambarkan bahwa mengalami eskalasi konflik atau penarikan konflik. Tahapan tahapan konflik dalam penelitian ini adalah :

Pertama, tahapan pra-konflik yaitu tahapan dimana konflik kadang kala tidak terlihat namun ada beberapa pihak yang merasa bahwa kejadian tersebut akan menimbulkan konflik ke arah konfrontasi. Dalam penelitian tahapan pra konflik berupa masalah adanya simpang siur terkait informasi mekanisme penyaluran bantuan sosial provinsi antara pemerintah provinsi, penyalur, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga timbul rasa tidak puas, perbedaan keyakinan, ketidaktertarikan terhadap orang lain atau warga yang disakiti, kebencian dan kurang adanya koordinasi antara pemerintah kota dan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan persepsi dan pemahaman berbeda yang di rasakan oleh setiap pihak yang terlibat konflik.

Kedua, tahap konfrontasi yaitu konflik menjadi lebih terbuka ketika satu pihak merasakan adanya masalah dan orang yang merasa di rugikan mulai

melakukan tindakan kontra atau konfrontatif dan ini diikuti oleh bentrokan tingkat rendah antara kedua belah pihak yang berkonflik .

Ketiga, tahap krisis merupakan puncak konflik, di mana terjadi ketegangan atau konflik disertai dengan percekocokan dan perdebatan yang paling hebat. pada saat datangnya bantuan sosial provinsi yang pertama telah menyebabkan protes dan kegaduhan di Kelurahan Kopo sehingga penyaluran bantuan provinsi yang di berikan kepada masyarakat pada saat di lapangan masyarakat melakukan penyerangan berupa penolakan yang disepakati oleh masyarakat, panitia dan pemerintah daerah

Dari pihak-pihak yang berkonflik cara untuk mencapai penyelesaian konflik melalui negosiasi dan pendekatan persuasif dengan membicarakan apa yang sebenarnya terjadi mendengarkan keinginan daripada pihak antara warga, pemerintah daerah dan penyalur.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini mengkaji sosiologi konflik dan kemudian menemukan solusi atas masalah konflik yang timbul.

1. Pemerintah provinsi, penyalur, pemerintah daerah dan warga. Harus bekerja sama dan bertoleransi agar konflik seperti ini tidak terulang kembali. Saling memahami, komunikasi dan koordinasi menjadi hal paling penting yang perlu di perhatikan.
2. Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih fokus pada tahapan pemecahan masalah dan hasil penyelesaian konflik. Karena langkah pemecahan masalah memegang peranan penting dal pengambilan keputusan dari masalah yang muncul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Mohammad Hasan Rotinsulu dan Haryadi. 2013. *The Study on Mining Licence Overlaps*. The presidents Delivery Unit for Development and Oversight (UKP4) and The Departement of Foreign Affairs Trade and Development Canada : Cananda.
- Antonius Atosokhi Gea. 2002. *Relasi Dengan Sesama*. Elex Media Komputindo : Jakarta
- Barron, Patrick, dan Madden David. 2004. *Violence and Conflict Resolution In Non-Conflict Regions: The Case of Lampung, Indonesia*. Jakarta : World Bank
- Clara Elys Yunita. 2017. *Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu. Desa Sumber Agung. Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur*. S1 thesis. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta
- Daily, Nas. 2020. *Be Careful Of The Next 2 Years*. Youtube.com. <https://youtu.be/3KMzCR4o9aY>. Diakses pada 27 januari 2021 Pukul 12.23
- Dea Andriyawan. 2020. Ada Penolakan Bantuan, *Database Penerima Masih Jadi PR Pemprov Jabar*. Bandung,bisnis.com. <https://bandung.bisnis.com/read/20200423/549/1231796/ada-penolakan-bantuan-database-penerima-masih-jadi-pr-pemprov-jabar>. Diakses 12 Januari 2021 Pukul 13.19
- Dirokterat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. 2015. *Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Kementerian Lembaga*. Kementerian Keuangan
- Eman Supriatna 2020. *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Fisher, Simon Dkk. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia. Jakarta
- Gubernur Jawa Barat. 2020. *Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 406/Kep.251-Dinsos/2020*. Kepala Biro Hukum dan HAM. Bandung

- Haslan. 2015. *Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. S1 skripsi. Universitas Negeri Makassar : Makassar
- Hastuti, Ruhmaniyanti & Dyan Widyaningsih. 2020. *Pelaksanaan PKH dan Program Sebako Dalam Rangka Mitigasi Dampak Covid-19*. The SMERU Research Institute. Jakarta
- Ida Ruwida. 2020. *Pandemi Covid-19 Memicu Konflik Sosial Horizontal dan Vertikal di Indonesia*. S2sosiologi.fisip.unair.ac.id. <http://s2sosiologi.fisip.unair.ac.id/pandemi-covid-19-memicu-konflik-sosial-horizontal-dan-vertikal-di-indonesia>. Diakses 19 Januari 2021 Pukul 13.24
- Irianto Sulistyowati. 2003. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Kardina, Ari Setiarsih. 2012. *Konflik Perebutan Lahan Antara Masyarakat Dengan TNI Periode Tahun 2002-2011 (Studi Kasus di Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen)*. S1 thesis. Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina and Sunarso, Sunarso. 2019. *Resolusi Konflik Agraria Pada Pembangunan New Yogyakarta International Airport (Nyia) Dalam Perspektif Hak Dan Kewajiban Warga Negara*. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Mochamad Januar Rizki. 2020. *Kebijakan Bansos Pemerintah Akibat Covid-19 Perlu Dievaluasi..* Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb1000c12494/kebijakan-bansos-pemerintah-akibat-covid-19-perlu-dievaluasi>. Diakses 8 Oktober 2020 Pukul 08.39
- Nadia Rachma. 2017. *Analisis dan Resolusi Konflik Lahan Studi Kasus : Konflik Lahan Antara Paud Islam Mandiri Dengan Pembangunan Rprta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Nashrudin Azis. 2020. *Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2020*. Wali Kota Cirebon. Cirebon.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Nina Rohmana.(2020). *Data Warga Miskin Penerima Bansos Covid-19 Tumpang Tindih, Disnosnangkis Bandung Gencar Validasi*. Prbandungraya,pikiranrakyat.com. <https://prbandungraya.pikiranrakyat.com/kota-bandung/pr26855363/data-warga-miskinpenerima-bansos-covid-19-tumpangtindih-disnosnangkis-bandung-gencarvalidasi>. Diakses pada 25 April 2022

- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books: Solo.
- Nuraini, Yayang Zulfiani, Rompis Adrian & Adi Nurzamanan. 2021. *Implementasi Aplikasi Sapa Warga Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik*. Sumedang : Universitas Padjajaran : Sumedang.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2021 *bantuan bagi warga jabar terdampak PPKM mulai di salurkan*. Jabarprov.co.id. https://jabarprov.go.id/index.php/news/43188/_Bantuan_bagi_Warga_Jabar_Terdampak_PPKM_Mulai_Disalurkan Diakses 21 April 2022 Pukul 01.00
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2020. *Berita Gambar*. Jabarprov.co.id. https://jabarprov.go.id/index.php/berita_gambar/detail/2897/Bantuan_Sosial_Jaring_Pengaman_Sosial_JPS. Diakses 18 September 2021 Pukul 12.34
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2020. *Fitur baru di Aplikasi Pikobar Untuk Penerima Bansos, Cek Yuk!*. Jabarprov.co.id. <https://jabarprov.go.id/index.php/news/38020/2020/06/04/Fitur-Baru-di-Aplikasi-Pikobar-Untuk-Penerima-Bansos-Cek-Yuk>. Diakses 6 Januari 2021 Pukul 13.20
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 2020. *SOLIDARITAS Sistem Online Data Penerima Bantuan Sosial*. bansos.pikobar. Jabarprov.co.id. <https://bansos.pikobar.jabarprov.go.id>. Diakses 6 januari 2021 Pukul 13.39
- Pruitt Dean G, Jeffrey Z. Rubin. 2009. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmat,Saeful Pupu. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Universitas Brawijaya: Malang.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*.
- Robbins, Millett Judge. 1998. *Organizational Behavior*. Perpustakaan Nasional Australia. Australia.
- Sugiyono. 2008. *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta. Bandung
- Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2020. *Tanya/Jawab Umum Basis Data Terpadu*. <http://bdt.tnp2k.go.id>. Diakses 18 September 2021 Pukul 12.14
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. 2020. *Pedoman Umum Program Sembako 2020*, Kementrian Sosial : Jakarta
- Wahyono, Setyawan. 2012. *Konflik Antara Masyarakat Dengan Penambang Pasir Besi*. S1 thesis, Universitas Negeri Yogyakarta : Yogyakarta
- Yusuf Imam Santoso. 2020. *Lima Rekomendasi Penanggulangan Kemiskinan Akibat Pandemi Virus Corona*.Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/simak-5-rekomendasi-penanggulangan-kemiskinan-akibat-pandemi-covid-19>. Diakses 2 Oktober 2020 Pukul 08.43